

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN OLEH DINAS
PENDIDIKAN DI DESA BAGAN LIMAU KECAMATAN UKUI
KABUPATEN PELALAWAN
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DANA MAULANA AKHSAN

NPM : 167310571

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagau Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Dosen Pembimbing Nina Yuslimi, S.IP., M.si yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat

dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 03 September 2020

Dana Maulana Akhsa

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan” penelitian ini dilakukan berdasarkan pada fenomena yang ditemukan dilapang, seperti masih ditemukan sekolah yang masih dalam kategori kurang bermutu, aksesjalan menuju sekolah yang cukup sulit, hingga peran dinas yang dirasa masih kurang dalam menanganin peningkatan sekolah demi mencapai mutu yang baik.

Sebagai mana janji Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, bahwa negara menjamin akan memberikan pendidikan yang layak bagi rakyatnya, yang dalam hal ini menjadi menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah yang terkait dalam hal ini adalah dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sebagai bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat startegi yang digunakan dinas pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan didaerah Kabupaten, dan bagaimana Dinas Pendidikan meyusun strategi serta program yang akan mereka gunakan demi memenuhi standar mutu, yang telah ditetapkan dalam karya ilmiah ini, serta penggunaan teori yang dikemukakan oleh Buttrericck Keith.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pendidikan telah berusaha sebagai mungkin dalam menciptakan strategi yang akan digunakan berdasarkan pada kaidah-kaida yang dipegang oleh dinas pendidikan, yang menghasilkan program kebijakan demi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pelalawan, terutama di Sekolah Dasar Negeri 017 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui. Namu data yang terkumpul menunjukkan jika masih ada beberapa kendala, sehingga belum berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Starategi, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

This thesis is entitled "Strategies for Improving the Quality of Education by the Education Office in Bagan Limau Village, Ukui District, Pelalawan Regency". who are still lacking in winning school improvement in order to achieve good quality.

As the promise of the State of the Republic of Indonesia in the 1945 Constitution, that the state guarantees to provide decent education for its people, which in this case is mandatory for the local government concerned in this case is the education office of Pelalawan Regency, as an extension of the central government and as a form of implementation of regional autonomy.

This study aims to look at the strategies used by the education office in improving the quality of education in the district, and how the education office prepares the strategies and programs they will use to meet the quality standards set in this scientific paper, as well as the use of the theory put forward by Buttrick Keith.

The results of this study indicate that the Education Office has tried as much as possible to create a strategy that will be used based on the rules held by the education office, which results in program policies to improve the quality of education in Pelalawan Regency, especially in the 017 State Elementary School, Bagan Limau Village, Ukui District. . However, the data collected shows that there are still some obstacles, so it has not run optimally.

Keywords: Strategy, Quality of Education

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	10
3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
a. Tujuan Penelitian	11
b. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II.....	12
KONSEP DAN TEORI.....	12
A. Konsep Pustaka	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	12
2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	13
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	16
4. Teori Organisasi	17
5. Teori Strategi.....	18
6. Konsep Kebijakan Mutu.....	23
7. Teori Mutu Pendidikan.....	24
8. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Pikiran.....	27
C. Konsep Oprasional	28
D. Opasional variable.....	29
BAB III	31
TEKNIK PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31

B. Bentuk Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Key Informan dan Informan	32
E. Jenis Dan Sumber Data	33
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Waktu Penelitian	34
BAB IV	35
LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan	35
1. Geografis Kecamatan Ukui	35
2. Luas dan Letak Wilayah Kecamatan Ukui.....	35
3. Penduduk.....	37
B. Gambaran Instansi Penelitian.....	37
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.....	38
2. Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau	53
3. Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu	53
C. Identitas Informan	54
BAB V	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	54
1.1 Target	58
1.2 Produk	62
1.3 Kegiatan	65
B. Hambatan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau	69
BAB VI.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Hlm
1.1 Tabel 1.1 Daftar sekolah Dasar di Kecamatan Ukui.....	7
1.2 Tabel 1.2 Rekapitulasi Inventaris Sekolah.....	8
1.3 Tabel 1.3 Jumlah Siswa.....	8
1.4 Tabel 1.4 Daftar Pendidik.....	9
1.5 Tabel 1.5 Susunan Komite.....	9
1.6 Tabel 1.6 Waktu Penelitian.....	31
1.7 Tabel 1.7 Jumlah Desa.....	36
1.8 Tabel 1.8 Jarak Tempuh Desa.....	36
1.9 Tabel 1.9 Jumlah Penduduk.....	37
2.1 Tabel 2.1 Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hlm
1.1	Kerangka Fikir Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	25



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dana Maulana Akhsan
NPM : 167310571
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian komprehensif yang telah saya ikut serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manpun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2021

Dana Maulan Akhsan

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kertertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana yang telah diamanatkan dan telah tertuang dalam pembukaan Unndang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945, pada alenia ke empat.

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga negara menjamin setiap warga negara mendapat pendidikan yang berkualitas bahkan diwilayah yang terkategori dalam wilayah Tertinggal. Jaminan ini juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) “ Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Demi terwujudnya jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, makan tujuan ini dimasukan kedalam salah satu urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementrian Negara dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahtarakan masyarakat. Demi tercapainya

penyelenggaraan yang efektif dan efisien, maka pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah, berupa otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah, yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, yang mana daerah dianggap lebih tahu dan lebih paham dalam melaksanakan urusan pemerintah, yang tertuang dalam Undang-undang no 23 Tahun 2014.

Adapun urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu:

1. Urusan Pemerintah terdiri dari atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
5. Urusan pemerintah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan atau kepada Gubernur dan Bupati/ Wali kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintah umum.

Pelaksanaan Otonomi daerah dengan menganut Asas Desentralisasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu adanya perangkat daerah, yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Badan. Dalam urusan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tertera tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, yang mana dalam permasalahan kali ini lebih berfokus pada urusan wajib berupa pelayanan dasar, yaitu pendidikan.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Bagian Kedua Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota mendirikan organisasi perangkat daerah, salah satunya Dinas Pendidikan, hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 21 Tahun 2002

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Dalam Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan, yang didalam Peraturan Daerah tersebut memuat bahwa kepala Dinas pendidikan bertugas dalam penanganan kegiatan pendidikan di Pelalawan yang dibantu oleh Bidang Pengendalian mutu yang terdiri atas seksi penilaian, seksi Akreditasi, dan seksi Penjaminan mutu, yang menjalankan tugas sesuai amanat Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Pasal 10 ayat 2, yang mangamanatkan tugas yang didalamnya terdapat pengendalian mutu, pengaturan alokasi dana umum dan khusus. Oleh karena itu Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan harus bisa dan berkewajiban meningkatkan mutu sekolah yang bahkan berada di wilayah terkategori Tertinggal.

Adapun peningkatan mutu pendidikan ini juga tertuang dalam visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, dengan Visinya adalah “ Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata dan bermutu pada semua jalur dan jenjang pendidikan di Kabupaten Pelalawan tahun 2030 “.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam Penentuan Strategi umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tahun 2016-2021, dalam peningkatan mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Mempertahankan dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs, .
3. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan penguatan kompetensi profesi dan layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar minimal pendidikan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kelulusan siswa melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan penggunaan teknologi.
5. Menumbuhkembangkan bakat, minat dan kreativitas serta meningkatkan prestasi siswa.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Meningkatkan sarana prasarana dan alat/media pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
8. Meningkatkan mutu pelayanan bidang pendidikan nonformal, informal dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).
9. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/industri.
10. Memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
11. Melanjutkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
12. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa daerah terpencil dan sangat terpencil/tertinggal, kurang mampu, dan berprestasi.
13. Meningkatkan mutu dan pemberdayaan pengawasan pendidikan.
14. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu serta mengembangkan kurikulum muatan lokal.
15. Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah berbasis keunggulan dan teknologi serta pengembangan sekolah standar nasional.
17. Merintis Wajib Belajar Pendidikan 12 (dua belas) tahun,
18. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Menurut Hari Sudradjad (2005 : 17) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), lebih lanjut Sudradjat megemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan

pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal.

Husaini Usman (2006 : 411) mengemukakan 13 (tiga) belas karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan yaitu :

- Kinerja (performa)
- Waktu wajar (timelines)
- Handal (reliability)
- Data tahan (durability)
- Indah (aesthetics)
- Hubungan manusiawi (personal interface)
- Mudah penggunaannya (easy of use)
- Bentuk khusus (feature)
- Standar tertentu (conformance to specification)
- Konsistensi (concistency)
- Seragam (uniformity)
- Mampu melayani (serviceability)
- Ketepatan (acuracy)

Tabel 1.1 Daftar Sekolah Dasar di Kecamatan Ukui

No	Nama Sekolah	Lokasi Sekolah
1	Sekolah Dasar Negeri 001 Ukui	Ukui
2	Sekolah Dasar Negeri 002 Ukui Dua	Ukui Dua
3	Sekolah Dasar Negeri 003 Lubuk Kembang Bunga	Lubuk Kembang Sari
4	Sekolah Dasar Negeri 004 Simpang Pulai	Simpang Pulai
5	Sekolah Dasar Negeri 005 Bukit Jaya	Bukit Jaya
6	Sekolah Dasar Negeri 006 Tri Mulya Jaya	Tri Mulya Jaya
7	Sekolah Dasar Negeri 007 Kampung Baru	Kampung Baru
8	Sekolah Dasar Negeri 008 Lubuk Kembang Sari	Lubuk Kembang Sari
9	Sekolah Dasar Negeri 009 Air Emas	Air Emas
10	Sekolah Dasar Negeri 010 Silikuan Hulu	Silikuan Hulu
11	Sekolah Dasar Negeri 011 Bukit Gajah	Bukit Gajah
12	Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu	Silikuan Hulu
13	Sekolah Dasar Negeri 013 Lubuk Kembang Sari	Lubuk Kembang Sari
14	Sekolah Dasar Negeri 014 Silikuan Hulu	Silikuan Hulu

15	Sekolah Dasar Negeri 015 Bukit Gajah	Bukit Gajah
16	Sekolah Dasar Negeri 016 Air Hitam	Air Hitam
17	Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau	Bagan Limau
18	Sekolah Dasar Negeri 018 Ukui	Ukui
19	Sekolah Dasar Swasta Permata Soga	Ukui Dua
20	Sekolah Dasar Swasta Global Amanah	Lubuk Kembang SARI
21	Sekolah Dasar Swasta Permata Andalan	Baskem Sentral Desa Bagan Limau
22	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Lubuk Kembang Sari
23	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	Kampung Baru

Sumber: Modifikasi Penulis

Lokasi penelitian dilakukan ialah di Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau, yang berjarak sekitar 107 kilometer dari ibu kota kabupaten, dengan alasan sekolah tersebut terletak jauh dari pusat ekonomi Kecamatan dengan jarak 36 kilometer, dengan akses jalan yang sulit di tempuh, kualitas bangunan yang sangat tidak memadai, fasilitas sekolah yang tidak dapat menunjang keberlangsungan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu, serta kekurangan tenaga pengajar.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Inventaris Sekolah

STATUS PEMILIKAN, KONDISI DAN LUAS RUANGAN									
N O	JENIS RUANGAN	MILIK SEKOLAH						BUKAN MILIK	
		BAIK		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		JUMLAH	LUAS
		JUMLAH	LUAS	JUMLAH	LUAS	JUMLAH	LUAS		
01	Ruang Kelas	5	280	-	-	6	336	-	-
02	Ruang Tamu	-							
03	Ruang Perpustakaan	1	56	-	-	-	-	-	-
04	Ruang Kepala Sekolah	1	48						
05	Ruang Guru	1	56						
06	Ruang BK								
07	Ruang TU								
08	Ruang Wakil Kepala Sekolah								
09	Ruang								
10	Ruang								
11	Ruang								
12	Ruang								

13	Ruang										
14	Ruang U.K.S	1	75								
15	Ruang Praktik Komputer										
16	Koprasi										
17	Ruang Osis										
18	WC Murid	6									
19	Gudang										
20	Aula										
21	Mushola										
22	Rumah Dinas Kepala Sekolah										
23	Rumah Penjaga Sekolah										
24	Pos Penjaga Sekolah										
25	Ketrampilan										
26	WC Guru	2									

Sumber: Data Sekolah

Tabel 1.3 Jumlah Siswa

Kelas											Jumlah	
1		2		3		4		5		6		320
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
37	30	42	21	28	26	26	15	26	17	28	24	

Sumber: Data Sekolah

Tabel 1.4 Daftar Pendidik

Daftar Pendidik dan Tenaga Pendidikan SD NEGERI 017 BAGAN LIMAU					
No	Nama	JK	NIP	Status Kepegawaian	Pendidikan Akhir
1	Agus Supriyanto, A.ma.pd	L	198108132014061007	PNS	S1
2	Dewi Indah Sosilowati	P		Guru Honor	S1
3	Dian Asrina Muthar	P		Tenaga Honor	SMA
4	Edi Mohamad Muhtar, S.pd.i	L	196805171992031004	PNS	S1
5	Erita publis, S.pd.i	P		Honor Daerah	S1
6	Kumala Dwi Siregar	P		Guru Honor	SMA
7	Muhni, A.ma.pd	L	197701192008011008	PNS	D2
8	Nurhandayani	P		Guru Honor	SMA
9	Nurhasanah	P		Guru Honor	S1
10	Priyanto Makaminang, S.pd	L	197404262005021001	PNS	S1

11	Rubiyanti, A.ma.pd	P	198504242014062007	PNS	S1
12	Rully Hariyani, A.ma.pd	P	197410012006042007	PNS	S1
13	Sambi, S.pd	L	196909291992031007	PNS	S1
14	Siti yuliani	P		Honor Daerah	S1
15	Sri Saparni	P		Tenaga Honor	S1
16	Suhartina	P	197404062005022001	PNS	S1
17	Sukatno	L		Honor Daerah	S1
18	Sumiyati	P	198105022008102024	PNS	S1
19	Suraji, S.pd.sd	L	196509221991121001	PNS	S1
20	Suwandi	L		Tenaga Honor	SMP

Sumber: Modifikasi Penulis

Tabel 1.5 Susunan Komite

Komite Sekolah	
Ketua	Lamhudin Harahap
Sekretaris	Isqak
Bendahara	Suratno

Sumber: Modifikasi Penulis

Berdasarkan pada peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan serta teori pendidikan bermutu, penulis menemukan beberapa fenomena dalam permasalahan ini:

- Berdasarkan hasil observasi penulis, menemukan salah satu sekolah di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang jauh dari kata bermutu, dengan kondisi sarana dan prasaranan yang sangat tidak memadai, seperti sarana olah raga yang kurang, tempat ibadah, alat peraga dan media pembelajaran

- Akses jalan yang kurang memadai. Dilihat jenis jalan yang masih tanah yang melewati tanah kaplingan milik warga yang jikalau hujan, maka akses akan lebih sulit.
- Peran Dinas Pendidikan yang dirasa kurang sigap dalam menangani sekolah yang masih dalam kualitas yang kurang baik.

Dengan banyaknya payung hukum yang terdapat dalam kabupaten pelalawan yang nantinya menjadi dasar dalam peningkatan mutu pendidikan, serta berdasarkan kondisi sekolah yang sedemikian, maka peran dari dinas pendidikan akan sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di wilayah Kecamatan ukui, lebih tepatnya Desa Bagan Limau. Serta mengetahui strategi yang digunakan oleh dinas pendidikan yang nantinya ingin diketahui apakah, strategi yang digunakan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di dalam latar belakang masalah pada bagian 1.1, mengenai peran Dinas Pendidikan serta mutu pendidikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini berupa: **“Bagaimana Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”**

3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diambil oleh Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan meningkatkan mutu pendidikan di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Penelitian

- a) Secara Teoritis : Sebagai bahan pengembangan ilmu pemerintahan terutama dalam bidang pendidikan.
- b) Secara Praktis : Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam bidang pendidikan.

BAB II

KONSEP DAN TEORI

A. Konsep Pustaka

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan sebagai salah satu cabang studi ilmu sosial memiliki banyak arti, sebagaimana ahli memberikan pengertian dalam arti luas yaitu menurut Montesquieu pemerintahan adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan trias potical, baik itu legislatif (yang membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Ilmu Pemerintahan Menurut Ndraha (dalam Syafiie, 2011;8) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Kemudian Ndraha (2005;36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Sedangkan menurut Syafiie, (2011;23) ilmu pemerintahan adalah yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahan) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahannya secara baik dan benar. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan kharismatik

menjalankan roda Pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin Ilmu Pengetahuan adalah Karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan sistematis serta spesifik/ khas (syafie,2011;20)

Dengan demikian Menurut Syafiie, (2011;10) Ilmu Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang Legislasi, Yudikasi, dan Eksekusi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar Lembaga serta yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala Pemerintahan. Pemerintah melakukan Pelayanan kepada Masyarakat dan mengantisipasi dekadensi Moral dengan Kekuasaan negara yang dimiliki.

Sedangkan Menurut Iver dalam Syafi'ie (2005:22-23) Mengatakan Pemerintahan itu adalah Suatu Organisasi dari Orang-orang yang mempunyai Kekuasaan, jadi Ilmu Pemerintahan adalah Sebagai Suatu Ilmu tentang Bagaimana manusia adalah Perintah. Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan Pengurusan (eksekutif), Kepemimpinan dan Koordinasi secara Baik dan Benar.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut ndraha (2003:5) pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa politik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya dan sebagainya. Pada dasarnya proses-proses itu kumulatif proses demand-supply, produksi konsumsi,

pemasaran, penjualan distribusi ekspedisi, pembelian, penerimaan, penggunaan dan evaluasi feedback.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah badan yang menciptakan dan melaksanakan kebijakan public dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat-istiadat, insitusi dan hukum dalam sebuah negara, pemerintah ialah organ yang mengurus layanan public untuk Warga Negara Asing yang berada pada wilayah indonesia yang hak untuk bertempat tinggal di negara Indonesia.

Pemerintahan adalah sebuah proses produksi dan distribusi alat-alat pemenuh kebutuhan tuntutan rakyat, Ndraha (2003:146). Secara umum pebentukan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Dari sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka.
2. Dari sistem pemerintahan birokratis-partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan.
3. Dari sistem pemerintah hyper sentralistik ke sistem pemerintah desentralistik.
4. Dari pertanggung jawaban vertical ke penanggung jawaban horizontal.
5. Dari paternalisme despotic ke control social.
6. Dari suksesti (penggantian jabatan) berdasarkan dinasti atau anugerah ke recruitment dan selection.
7. Dari lomptan ke tahap teknologi.
8. Dari manajemen proyek ke manajemen fungsi dan tugas
9. Dari budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik.
10. Dari kita menjadi saya.
11. Unit kerja pemerintahan yang paling bawah di perlukan sebagai embel-embel, pelengkap penderita, diabaikan.
12. Dari pemberian pemberdayaan.
13. Dari sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan aspirasi rakyat kalimat sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bahas birokrasi.
14. Dari menolong ke dialog (Ndraha 2003: 149).

Sedangkan menurut Ndraha (dalam wasistiono, 2003:6) menyatakan pemerintahan adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Erlina (2005;2) Pemerintahan adalah Organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan Kewenangan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti Luas merupakan Suatu yang lebih besar dari pada Suatu Kementrian yang diberi Tanggung Jawab memelihara Perdamaian dan Keamanan Negara .

Sedangkan Menurut Munaf (2015;47) Pemerintahan dalam Pradigma lama memiliki Objek Material Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, Namun Dalam Pradigma baru Pemerintahan dipandang memiliki Objek materialnya masyarakat, sehingga Pemerintahan dimaknai sebagai Suatu Proses menata Kelola Kehidupan Masyarakat dalam suatu Pemerintahan /Negara .

Menurut Maulidiah (2014;4) Pemerintahan memiliki Tiga fungsi yang hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok Pemerintah, Ketiga fungsi hakiki Pemerintah tersebut, yakni memberikan Pelayanan Kepada masyarakat (service), memberdayakan segala Potensi yang dimiliki (empowerment), serta melaksanakan Pembangunan (development)

Menurut Ryas Rasyid (dalam Maulidiah, 2014;4) Tugas Pokok Pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu :

1. Pelayanan (service)

2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

3. Konsep Pemerintah Daerah

Sebagai sebuah Negara Republik Indonesia memiliki filsafat Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 kerangka kenegaraan dan sistem Pemerintah Republik Indonesia diatur. Negara Indonesia adalah Negara konsitusi yang menggunakan sistem demokrasi dan bentuk Negara kesatuan. Untuk menyelenggarakan Negara Indonesia, dibentuk lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. Legaslatif.
2. Eksekutif.
3. Yudikatif.
4. Pemeriksa Keuangan.

Namun melihat wilayah Negara Indonesia sangat besar dengan letak geografi luas dengan kondisi sosial budaya yang beragam. UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang yang bersifat otonom dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan (Nurcolis:2005).

Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Menurut Rosidi (2010;78) kata pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *government* yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan.

4. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005:6) organisasi adalah kerangka didalam dimana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang di satukan.

Kelangsungan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencapai suatu usaha sebagaimana yang tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi adalah sumber daya manusia agar dapat mendukung sebuah kelangsungan organisasi.

Organisasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat kerja sama agar mencapai tujuan tertentu yang dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan organisasi dapat terbentuk persirakatan manusia agar tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas, dari proses pengorganisasian.

5. Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos”, yang berarti a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai “kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”.

Namun dewasa ini istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi.

. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan.

Menurut David (2011:18-19) Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi

georafis, diversifikasi, akusisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah – daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu..

Sedangkan Menurut Pearce II dan Robinson (2008:2), strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai tujuan 10 Perusahaan dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari Strategi adalah sebuah tindakan proses perencanaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan, dengan melalukan hal-hal yang besifat terus menerus sesuai keputusan bersama dan berdasarkan sudut pandang kebutuhan pelanggan.

Menurut Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan misi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert. Jr (2005), konsep strategi dapat di definisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu :

- (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (intens to do).
- (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (eventually does).

Menurut Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas.

Menurut Quinn (1999) strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan dan aksi utama dalam hubungan yang kohesif. Suatu strategi yang baik akan membantu organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk unique berbasis kompetensi internal serta kemampuan mengantisipasi lingkungan.

Menurut Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999) strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (action plans) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi (Nainggolan, 2008).

Menurut Jatmiko (2003:4), Strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber

daya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan pada defenisi tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi, yaitu lingkungan eksternal, sumberdaya dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan dicapai. Intinya, suatu strategi organisasi memberikan dasar-dasar pemahaman tentang bagaimana organisasi itu akan bersaing dan survive.

Menurut Jauch dan Glueck dalam buku Jatmiko (2003:5), mendefenisikan strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi.

Menurut Allison dan Kaye (2004:3), strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi juga merupakan pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Menurut Hamel dan Prahalad dalam buku Rangkuti (2009:4), Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “ apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kopetensi inti (core competencies).

Menurut porter dalam buku Rangkuti (2009:4), strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Dari defenisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau teknik yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mempelajari

dan memahami lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman).

Mahmudi (2010:62), perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual. Tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemrograman, penganggaran dan implementasi. Tahap pembangunan fisik akan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh.

Selanjutnya, Burhan (dalam Sjafrizal, 2009:190) merinci empat karakteristik dari rencana strategis. Empat karakteristik tersebut adalah (a) menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang, (b) merupakan suatu proses yang dimulai dengan menggariskan sarana-sarana, strategis dan kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan (Action Plan) untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. (c) merupakan suatu sikap dan cara hidup tertentu karena rencana strategis menuntuk kebiasaan untuk bekerja berdasarkan perkiraan masa depan dan (d) mengaitkan tiga rencana sekaligus yaitu rencana strategis, rencana jangka menengah, dan anggaran jangka pendek. Dengan demikian terlihat bahwa rencana strategis ternyata merupakan sebuah konsep perencanaan untuk jangka menengah yang bersifat strategis dan juga konprehensif yang dapat diterapkan baik untuk pengembangan kegiatan bisnis maupun untuk mendorong proses pembangunan suatu institusi pemerintah atau swasta, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Dengan banyaknya pengertian serta konsep tentang strategi dari berbagai ahli, namun dalam penelitian ini penulis lebih berfokus dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Menurut Markides (2004), yaitu Strategi merupakan sebagai sebuah pengambilan keputusan menyangkut tiga parameter utama, yang pertama siapa yang menjadi target dan siapa yang tidak akan ditarget, yang kedua produk dan jasa apa yang ditawarkan, dan sasaran produk dan jasa apa yang tidak akan ditawarkan, yang ketiga aktivitas apa yang akan dan tidak akan dilakukan dalam rangka mewujudkan itu semua. Pentingnya pilihan strategi menyangkut apa yang bakal menjadi fokus organisasi dan apa yang tidak akan dilakukan organisasi.

6. Konsep Kebijakan Mutu

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, tertuang 8 kriteria mutu pendidikan, yaitu:

- Standar Isi. Berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
- Standar Proses. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.
- Standar Penilaian Pendidikan. Berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.
- Standar Kompetensi Lulusan. Berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
- Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
- Standar Pengelolaan. Berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan.
- Standar Pembiayaan Pendidikan. Berkaitan dengan anggaran sekolah.
- Standar Sarana dan Prasarana. Berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.

Dengan berdasar pada peraturan yang ada, maka sekolah dituntut untuk memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, yang nantinya akan menjadi peran dari

Dinas Pendidikan yang telah menerima kuasa otonomi daerah, dalam memenuhi kriteria yang ada.

7. Teori Mutu Pendidikan

Mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai standar ideal.

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal dan social, yang secara menyeluruh disebut sebagai kecakapan hidup (Hari Sudrajat, 2005:17).

Husaini Usman (2006 : 411) mengemukakan 13 (tiga) belas karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan yaitu :

- Kinerja (performa) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah meliputi : kinerja guru dalam mengajar baik dalam memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah vavorit.
- Waktu wajar (timelines) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.
- Handal (reliability) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- Data tahan (durability) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.
- Indah (aesteties) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.

- Hubungan manusiawi (personal interface) yakni menunjang tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme.
- Mudah penggunaannya (easy of use) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam di kembalikan tepat waktu.
- Bentuk khusus (feature) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi).
- Standar tertentu (conformance to specification) yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
- Konsistensi (consistency) yakni keajeng, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya.
- Seragam (uniformity) yakni tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam dalam berpakaian.
- Mampu melayani (serviceability) yakni mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas.
- Ketepatan (accuracy) yakni ketepatan dalam pelayanan misalnya sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah.

Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Adapun dalam arti deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan senyatanya misalnya hasil tes prestasi belajar. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstra kurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu. (Marsus Suti Jurnal MEDTEK, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2011).

8. Penelitian Terdahulu

no	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyuni, 2018	Strategi Pemerintahan	• Fokus pada strategi	• Pendekatan Manajemen

	(Skripsi)	Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Massamaturu Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Takalar	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas • Metode pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Teori yang digunakan • Hasil penelitian
2	Kasmira, 2020 (Skripsi)	Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemerintah • Pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian • Lokasi penelitian • Hasil penelitian
3	Shinta Anandan, 2019 (Skripsi)	Strategi Pemerintahan Aceh Barat Dalam Menyebarluaskan Informasi Program Kerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Strategi • Pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitain • Lokasi penelitian • Hasil penelitian
3	Usman Lukman Hakim, 2012 (Jurnal)	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemerintah • Bentuk Penelitian • Metode pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus Penelitian • Lokasi penelitian • Hasil penelitian
4	Zuchri Abdussamad dan Ritmon Amala, 2016	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pemerintah • Peningkatan Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Fenomenologis • Lokasi

	(Jurnal)	Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongdow Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pengumpulan data 	penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian
5	Abdurrozzaq Hasibuan. 2017 (Jurnal)	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatra Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pendidikan • Fokus penelitian • Metode pengumpulan data 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Penelitian • Lokasi penelitian • Hasil penelitian

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Berdasarkan tabel diatas penetapan penelitian terdahulu sebagai upaya perbandingan dengan penelitian yang akan dianalisa dengan tujuan melihat adanya persamaan dan perbedaan di dalam penelitian. Dalam penelitian terdahulu yang diambil, memiliki persamaan dan juga perbedaan seperti metode penelitian, penggunaan teori, fokus penelitian, serta lokasi penelitian.

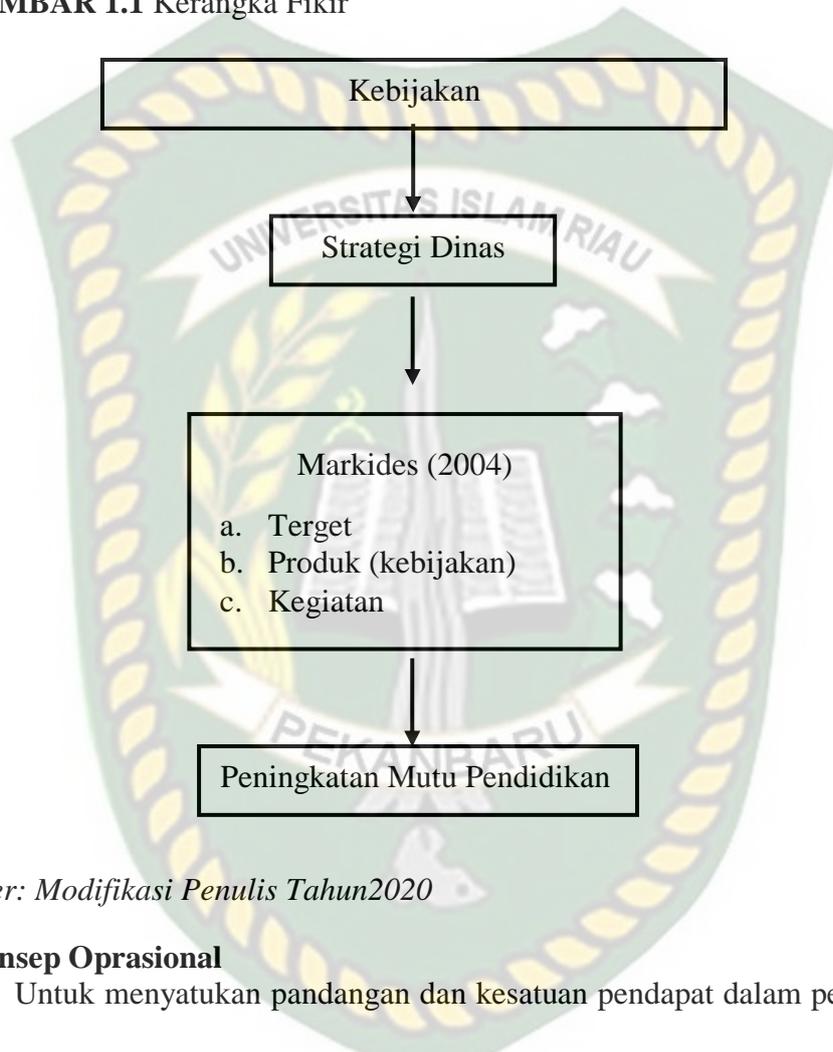
B. Kerangka Pikiran

Dalam penelitian ini, berawal dari hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengat amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, melihat pada fenomena yang telah di paparkan diawal, mengenai Sekolah Dasar negri 017 Bagan Limau yang termasuk dalam katagori sekolah yang belum bisa dikatakan bermutu.

Dengan melihat konsep strategi yang dipaparkan oleh Markides (2004) bahwa strategi tersusun dari 3 unsur utama yang perlu diperhatikan, target,

produk, dan kegiatan, dengan berpegang pada teori yang kita gunakan, akan mudah melihat dimana letak kesalah dari strategi tersebut.

GAMBAR 1.1 Kerangka Fikir



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2020

C. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan kesatuan pendapat dalam penelitian ini dan untuk menghindarkan interpretasi yang berada dengan konsep yang digunakan, maka diperlukan persamaan konsep dalam indicator-indikator variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

1. Strategi : proses penentuan rencana yang dalam pembuatannya melihat tiga aspek utama, yaitu target, produk, dan kegiatan.

2. Mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau di standarkan Crosby (1979:58).
3. Mutu Pendidikan : Kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan.
4. Pendidikan : pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.
5. Dinas Pendidikan: kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
6. Peranan : merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

D. Opasional variable

Opasional variable tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh

Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan:

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4

Konsep strategi, proses penentuan rencana yang dalam pembuatannya melihat tiga aspek utama, yaitu target, produk, dan kegiatan. (Markides (2004))	Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Target 	<ul style="list-style-type: none"> • Skala prioritas dalam penentuan target
	Pendidikan Di Desa Bagan	<ul style="list-style-type: none"> • Produk (Kebijakan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyesuaian terhadap target
	Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan yang sesuai dengan SOP

Sumber: Modifikasi Penulis

BAB III

TEKNIK PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penggunaan tipe penelitian untuk mengukur secara cermat dengan menggunakan analisis kualitatif melalui gambaran sistematis dan pengumpulan fakta-fakta yang ada, penelitian dibatasi dengan data yang terkumpul dan sampel yang mewakili populasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian *deskriptif*, menurut Darmadi (2013:6) yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan penumpukan data atau gejala. Yang dalam hal ini mengenai Dampak Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

B. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Maleong, yang diikuti oleh Haris (2010), metode penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak social secara alami dengan mendepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

C. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah dasar SDN 017 Bagan Limau Kabupaten Pelalawan Kecamatan ukui. Seko;ah ini berada di ruang lingkup dinas pendidikan di Kabupaten Pelalawan, adapun alasan pengambilan lokasi tersebut didasari oleh kondisi sekolah SDN 017 Bagan Limau berada dalam kondisi yang kurang baik seperti :

1. Kondisi bangunan sekolah yang berada dalam kondisi yang kurang baik.
2. Jumlah guru yang kurang memadai.
3. Fasilitas pendukung yang belum mampu menunjang belajar.
4. Akses sekolah yang sulit di tempuh.

D. Key Informan dan Informan

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam ini untuk melihat pembuatan strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar Bagan Limau. Adapun key informan dari penelitian ini ialah, bapak Suardi selaku kasubag umum dan kepegawaian.

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Zamri, S.Sos	Kasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
2	Edi Mohammad Muthar, S.pd.i	Kepala Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau
3	Ngantiyem	Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu
4	Nurhandayani	Guru Honor Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui buku, dokumen, dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian, pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

1. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis atau bersifat terbuka adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan mengenai strategi peningkatan mutu pendidikan.

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau yang sebagai objek penelitian, yang dalam kondisi kurang dalam kualitas pendidikan, serta

observasi terhadap dinas pendidikan kabupaten pelalawan dalam pembuatan strategi peningkatan mutu pendidikan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian.

G. Waktu Penelitian

Tabel 1.7 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Strategi Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Desan Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

N O	Jenis Kegiatan	Tahun 2020 / 2021															
		Juni- Desember 2020				Januari - maret 2021				April- Juni 2021				Juli- nov 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■															
2	Seminar UP		■														
3	Revisi UP			■													
4	Revisi kuesioner				■												
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian (Skripsi)					■											
9	Konsultasi Revisi Skripsi									■	■	■	■				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi													■			

BAB IV

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Geografis Kecamatan Ukui

Secara topografi Kecamatan Ukui memiliki lokasi datar sampai berombak 48% dan berombak berbukit 52% dengan ketinggian 35 meter dari permukaan lau, yang berpotensi untuk mengembangkan tanaman pangan, perkebunan maupun holikultura, faktor yang besar budidaya perkebunan.

Kecamatan ukui memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat angin musim dengan jumlah curah hujan berkisar 2.200 mm sampai 3.000 pertahun, tempratur rata-rata 22°C - 32° dan kelembapan nisbi antara 80-88%

2. Luas dan Letak Wilayah Kecamatan Ukui

Kecamatan Ukui memiliki luas wilayah 615,08 Km², dengan wilayah terluas adalah desa ukui dua yaitu 257,04 Km², Kecamatan Ukui merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi kabupaten Pelalawan yang berada di pulau Sumatera dengan memiliki batas batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lesung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Pangkalan Lesung

Sedangkan letak wilayah adalah:

- $00^{\circ}07$ Lintang Utara s/d $1^{\circ}28'17''$ Lintang Utara
- $12^{\circ}08$ Bujur Timur s/d $101^{\circ}43'26''$

Kecamatan ukui terdiri dari 12 Desa/Kelurahan

Tabel 1.7 Jumlah Desa

Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Silikuan Hulu	Desa	6	18
Lubuk Kembang Sari	Desa	6	25
Lubuk Kembang Bunga	Desa	8	32
Air Hitam	Desa	4	14
Kampung Baru	Desa	6	16
Ukui Satu	Kelurahan	11	29
Ukui Dua	Desa	7	-
Bukit Gajah	Desa	6	24
Bukit Jaya	Desa	5	18
Air Emas	Desa	4	20
Tri Mulya Jaya	Desa	4	14
Bagan Limau	Desa	5	20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

Adapun jarak tempuh antar Desa dengan Kantor Bupati dan Kantor Camat ialah

Tabel 1.8 Jarak Tempuh Desa

Desa/Kelurahan	Ke Kantor Bupati	Ke Kantor Camat
Silikuan Hulu	100	20
Lubuk Kembang Sari	95	21
Lubuk Kembang Bunga	95	29
Air Hitam	89	25
Kampung Baru	90	18
Ukui Satu	75	-
Ukui Dua	80	6
Bukit Gajah	78	7
Bukit Jaya	80	12
Air Emas	72	10
Tri Mulya Jaya	80	14
Bagan Limau	95	30
Ukui	65	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

3. Penduduk

Jumlah penduduk kecamatan Ukui pada pertengahan tahun 2019 adalah 42.110 jiwa, dengan perbandingan laki-laki 22.054 jiwa dan perempuan 20.056 jiwa dengan kepadatan penduduk 67 Jiwa/Km²

Tabel 1.9 Jumlah Penduduk

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Silikuan Hulu	1231	1231	2462
Lubuk Kembang Sari	1683	1655	3338
Lubuk Kembang Bunga	2265	1734	3999
Air Hitam	2247	1978	4225
Kampung Baru	1592	1505	3097
Ukui Satu	3204	3051	6255
Ukui Dua	3826	3354	7180
Bukit Gajah	1892	1823	3715
Bukit Jaya	1057	1007	2064
Air Emas	1285	1212	2497
Tri Mulya Jaya	893	763	1656
Bagan Limau	879	743	1622
UKUI	22054	20056	42110

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

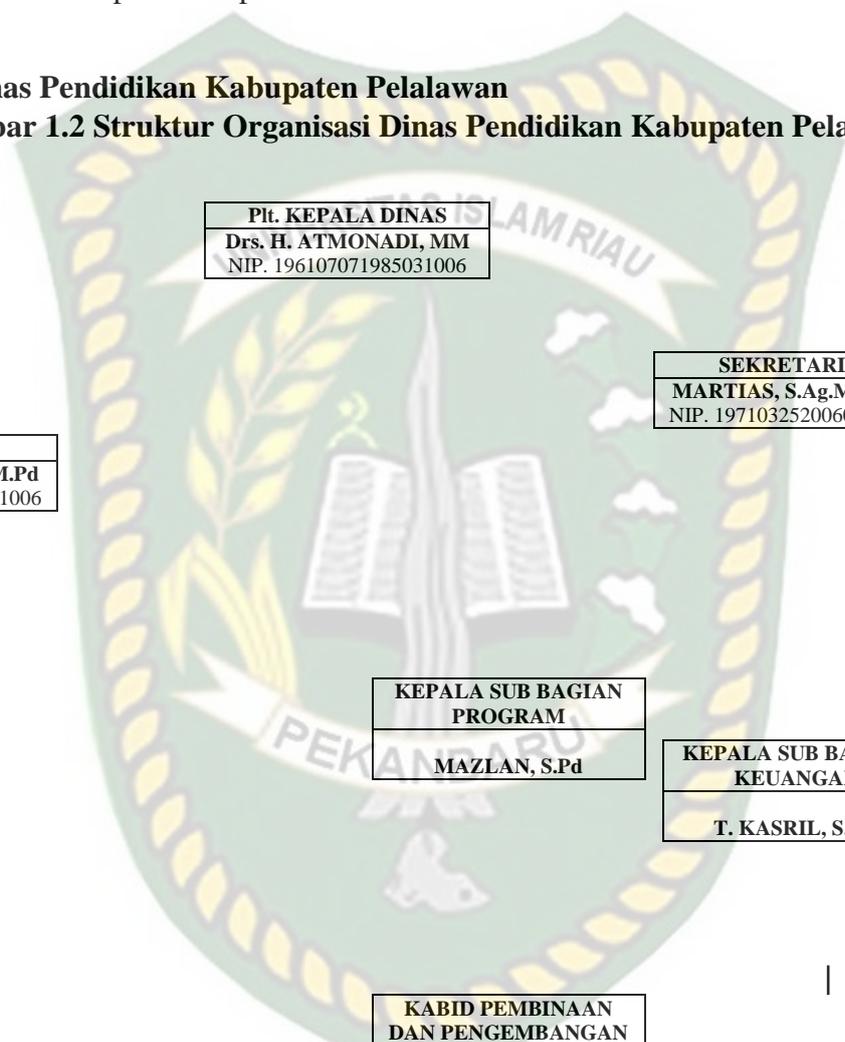
B. Gambaran Instansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua instansi untuk dilakukan penelitian, instansi tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, dan Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau. Adapun alasan pengambilan instansi tersebut berdasarkan permasalahan dalam penelitian, Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Sebagai Instansi yang terkait dan bertanggung jawab atas penelitian ini, yang mana meneliti tentang strategi yang digunakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan Sekolah Dasar 017 Bagan

Limau sebagai sekolah yang dipilih untuk dijadikan fokus penelitian ini, dengan alasan sebagai sekolah yang berada paling jauh dari dari pusat pemerintahan, baik dari Kantor Bupati Kabupaten Pelalawan dan Kantor Camat Kecamatan Ukui.

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan



Plt. KEPALA DINAS
Drs. H. ATMONADI, MM
NIP. 196107071985031006

SEKRETARIS
MARTIAS, S.Ag.MM.Pd
NIP. 197103252006041006

SEKRETARIS
MARTIAS, S.Ag.MM.Pd
NIP. 197103252006041006

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
MAZLAN, S.Pd

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
T. KASRIL, S.Sos

K. SUB BAGIAN UMUM, DAN KEPEGAWAIAN
SUARDY, S.Sos. MH

KABID PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MAZLAN, S.Pd

KABID KEBUDAYAAN
H. SYARIFUDDIN, S.Pd

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
MARTIAS, S.Ag. MM.Pd

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
MASLIAN, S.Pd.SD. M.Si

Kasi Kurikulum, Kesiswaan dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama
NASIKI, S.Pd.M.Pd

Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala
NIRA ELPIRA, S.Pd.,

2. Pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokoknya;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang pendidikan; d. Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan dibidang pendidikan;
4. Pemberian pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok dibidang pendidikan;
5. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan tersebut, maka ditetapkan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai suatu kesatuan dari tugas dan fungsi dinas tersebut. Adapun susunan organisasi terdiri dari

- a) Kepala Dinas;
- b) Bagian Tata Usaha;
- c) Sub Dinas Pendidikan Dasar;
- d) Sub Dinas Pendidikan Menengah;
- e) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah;
- f) Sub Dinas Pemuda dan Olah raga;
- g) Cabang Dinas;
- h) UPTD;
- i) Kelompok Jabatan Fungsiona

a. Kepal Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, megevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan akreditasi sekolah, PLS, Evaluasi Belajar Tahap Akhir, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan kepegawaian, pembinaan karir, pelatihan, tenaga kependidikan dan fungsional, menetapkan perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah, alokasi khusus pendirian dan penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan, juklak kendali mutu, petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan, pendayagunaan program teknologi komunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usah menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dinas;
2. Melaksanakan perencanaan program kegiatan dinas;
3. Melaksanakan perencanaan program pendidikan
4. Melaksanakan akreditasi sekolah;
5. Melaksanakan pengeloaan urusan keuangan;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.

Bagian Tata Usaha Terdiri

1. Sub Bagian Umum;

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan

pendayagunaan program teknologi komunikasi, pengawasan, pengendalian, pengelolaan perlengkapan, protokol dan kerumahtanggaan.

2. Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pendidikan, pendirian dan penutupan Pendidikan Dasar dan Menengah Juklak kendali mutu, penyelenggaraan Pendidikan, alokasi anggaran, alokasi khusus, alokasi biaya, kebijakan penerimaan siswa, petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Sub Bagian Tata Laksana;

Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan akreditasi sekolah, pendidikan luar sekolah, evaluasi tahap akhir, petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian penghargaan tanda jasa, kesejahteraan tenaga pendidik.

4. Sub Bagian Kepegawaian;

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengelolaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan, Tata Usaha Sekolah, Kelompok Jabatan Fungsional, pembinaan karir dan pelatihan tenaga pendidikan dan fungsional.

5. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penetapan petunjuk pelaksanaan, alokasi biaya pendidikan, pengawasan, pengendalian pengelolaan keuangan (rutin subsidi/bantuan, gaji pegawai/guru)

c. Sub Dinas Pendidikan Dasar

Sub Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana program pengembangan kurikulum Nasional dan Muatan Lokal, serta mempersiapkan kalender pendidikan, menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan kurikulum serta memonitor dan membina pelaksanaan kurikulum pada tingkat Pendidikan Dasar, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan;
2. Membuat rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru;
4. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan bimbingan evaluasi belajar;
5. Membuat rencana usulan penetapan sumbangan BP3 dan partisipasi masyarakat lainnya terhadap Pendidikan Dasar;
6. Melaksanakan pengawasan, pembinaan Profesi Guru, tenaga struktural dan teknis lainnya pada Pendidikan Dasar.

Sub Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum;

Seksi Kurikulum mempunyai tugas merencanakan dan

menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, menyusun kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif Pendidikan Dasar, mengkoordinir pelaksanaan kurikulum Nasional Pendidikan Dasar, melaksanakan Akreditasi Pendidikan Dasar, memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar, menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa, menyusun dan mengadakan soal EBTA Pendidikan Dasar, menetapkan petunjuk pelaksanaan ekstra kurikuler, membina pengelolaan pendidikan dasar termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan/unggulan, melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pendidikan Dasar.

2. Seksi Tenaga Kependidikan;

Seksi Tenaga Kependidikan Dasar mempunyai tugas merencanakan kebutuhan Tenaga Kependidikan Dasar yang meliputi Kepala Sekolah, guru dan jaga sekolah, membuat usul pengadaan dan penempatan Tenaga Kependidikan Dasar yang meliputi Kepala Sekolah, guru dan jaga sekolah, membuat usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian/pensiun Kepala Sekolah Guru dan jaga sekolah, menyusun kebijakan pemberian tunjangan khusus untuk Kepala Sekolah dan Guru, mengusulkan penetapan kenaikan pangkat Kepala Sekolah ,

guru dan jaga sekolah, membuat usul penetapan kenaikan gaji berkala Kepala Sekolah, guru dan jaga sekolah, memproses izin cuti Kepala Sekolah, guru dan jaga sekolah.

3. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;

Seksi Pengadaan sarana Pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan pendataan kebutuhan Sarana Pendidikan Dasar, menyiapkan usul kebutuhan sarana pendidikan dasar, mengurus penyediaan dan pengurusan tanah untuk pembangunan pendidikan dasar, membuat rencana/usul pengadaan kebutuhan sarana belajar jarak jauh.

4. Seksi Pengadaan Pembukuan dan Alat Tulis Pelajaran.

Seksi Pengadaan Perbukuan dan Alat Pelajaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pendataan, pengadaan, penyusunan alat-alat pelajaran, membuat perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran buku pelajaran, membuat rencana kebutuhan pengadaan buku dan pembinaan perpustakaan, pengadaan alat labor IPA, komputer, alat visual dsb, pengadaan/penyaluran blanko STTB, DANEM dan Rapor Siswa.

d. Sub Dinas Pendidikan Menengah

Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kurikulum Pendidikan Menengah, merencanakan pengadaan

sarana dan prasarana, perbukuan, alat pelajaran serta pembinaan kesiswaan dan partisipasi masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, memantau, mengevaluasi dan menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah termasuk prasarana jarak jauh;
2. Melaksanakan semua kurikulum Nasional dan akreditasi, menetapkan kurikulum lokal, menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa serta pengadaan soal-soal EBTANAS Pendidikan Menengah;
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan Ekstrakurikuler dan kurikulum muatan lokal;
4. Melaksanakan pembinaan pengelolaan kegiatan siswa Pendidikan Menengah termasuk di sekolah daerah terpencil, sekolah terbuka dan sekolah rintisan/unggulan;
5. Pengadaan/penyaluran blangko STTB, DANEM, Buku Pelajaran Pokok Pendidikan Menengah.

Sub Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum;

Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah mempunyai tugas merencanakan dan menetapkan kurikulum muatan lokal Pendidikan Menengah, menyusun kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif Pendidikan Menengah, mengkoordinir pelaksanaan kurikulum Nasional Pendidikan Menengah atas dasar penetapan dan pedoman pelaksanaan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal, menetapkan petunjuk pelaksanaan Kalender Pendidikan Menengah, memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah, menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa, menyusun dan pengadaan soal EBTA Pendidikan Menengah, menetapkan petunjuk pelaksanaan ekstra kurikuler, membina pengelolaan Pendidikan Menengah, melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendidikan menengah.

2. Seksi Tenaga Kerja;

Seksi Tenaga Kependidikan Menengah mempunyai tugas merencanakan kebutuhan Tenaga Kependidikan Menengah yang meliputi Kepala Sekolah, Guru dan jaga sekolah, membuat usul pengadaan, penempatan, Tenaga kependidikan menengah yang meliputi Kepala sekolah, guru dan jaga sekolah, membuat usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian/pensiun kepala sekolah, guru dan jaga sekolah, menyusun kebijakan pemberian tunjangan khusus untuk kepala sekolah dan guru, mengusulkan penempatan kenaikan pangkat kepala sekolah guru dan jaga sekolah, membuat usul kenaikan gaji berkala Kepala sekolah, guru dan jaga sekolah, memproses izin cuti

kepala sekolah, guru dan jaga sekolah.

3. Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan;

Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pendataan kebutuhan Sarana Pendidikan Menengah, menyiapkan usul kebutuhan Sarana Pendidikan Menengah, mengurus penyediaan dan pengurusan tanah untuk pembangunan Pendidikan Menengah, perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Menengah, membuat rencana kebutuhan dan pengadaan sarana pendidikan menengah, membuat rencana kebutuhan sarana belajar jarak jauh.

4. Seksi Pengadaan Perbukuan dan Alat Pelajaran.

Seksi Pengadaan Perbukuan dan Alat Pelajaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pendataan, pengadaan, penyusunan alat-alat pelajaran dan perlengkapan, membuat perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran buku pelajaran, membuat perencanaan kebutuhan pengadaan buku dan pembinaan perpustakaan, pengadaan alat Labor IPA, komputer, alat visual dsb, pengadaan/penyalur blanko STTB, DANEM dan rapor siswa.

e. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, pembinaan kursus-kursus, pendidikan/pelatihan

masyarakat dan mengurus sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah, dengan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kursus-kursus;
2. Melaksanakan pendidikan/pelatihan masyarakat;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:

1. Seksi Kurikulum;

Seksi Kurikulum mempunyai tugas memfasilitasi dan mengembangkan peran serta masyarakat, menyusun dan penggandaan soal EBTA pendidikan luar sekolah serta penggandaan EBTANAS, melaksanakan Kurikulum Nasional dan Muatan lokal Pendidikan Luar Sekolah, menetapkan sistem dan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah, memilih dan mengembangkan modul program khusus, melaksanakan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah.

2. Seksi Pendidikan Masyarakat;

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pemberian izin, pembinaan, pengawasan pendidikan dan pengendalian pengelolaan pendidikan luar sekolah, melaksanakan evaluasi hasil belajar pendidikan luar sekolah, menetapkan perencanaan hasil belajar pendidikan luar sekolah, pembinaan kegiatan

kemasyarakatan, pemuda dan olahraga.

3. Seksi Subsidi Bantuan Sarana/Prasarana;

Seksi Subsidi Bantuan Sarana/Prasarana Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pengaturan, perizinan serta evaluasi penyelenggaraan kursus, pengadaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan luar sekolah, merencanakan kebutuhan, pengadaan dan penetapan tenaga pendidikan luar sekolah.

4. Seksi Pembinaan Kursus-kursus dan Pelatihan Masyarakat.

Seksi Pembinaan Kursus-kursus dan Pelatihan Masyarakat mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan kursus dan pembinaan keterampilan bagi setiap kegiatan kursus dikalangan masyarakat, pembinaan Tenaga Pengelola Kursus/Pelatihan, evaluasi kegiatan kursus-kursus/pelatihan untuk pengembangan atau penutupan kegiatan.

f. Sub Dinas Pemuda dan Olahraga

Sub Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina kegiatan olahraga di sekolah dikalangan pemuda dan masyarakat dalam rangka pengembangan, pengendalian prestasi olahraga, serta pengawasan, pembinaan kepemudaan dan pertukaran pemuda dan pelajar.

Sub Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari

1. Seksi Pembinaan Generasi Muda;

Seksi Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan latihan pemuda, Pramuka, Paskibraka, pertukaran pemuda dan pelajar, mengikutsertakan pemuda dalam kelompok kerja produktif dan kelompok minat, serta mengawasi, mengendalikan dan membina kegiatan organisasi kepemudaan.

2. Seksi Pembinaan Olahraga;

Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan olahraga dan membina prestasi dan atlit dari setiap cabang dan jenis olahraga di sekolah, dikalangan pemuda dan masyarakat, menyelenggarakan Pekan Kesegaran Jasmani dan rekreasi daerah dan pengangkatan pembinaan tenaga pengelola taman, instruktur, pelatih, pembimbing penyuluh kesegaran jasmani dan rekreasi

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda / Olahraga.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda / Olahraga mempunyai tugas mendata kegiatan kepemudaan, pembinaan pemuda, organisasi pemuda, perkumpulan olahraga, pengelolaan pemeliharaan prasarana kepemudaan, kepramukaan, perkumpulan olahraga, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga, fasilitas taman kesegaran jasmani dan rekreasi, mengurus sarana prasarana fasilitas dan dana untuk kegiatan pemuda/olahraga kesegaran jasmani dan rekreasi.

g. Cabang Dinas

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

h. Unit Pelaksana Tugas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau

Tabel 2.1 Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau

Nama	:	SD NEGERI 017 BAGAN LIMAU
NPSN	:	10404818
Alamat	:	Jln Poros Desa Bagan Limau
Kode Pos	:	28388
Desa/Kelurahan	:	Bagan Limau
Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Ukui
Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Pelalawan
Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
Status Sekolah	:	NEGERI
Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
Jenjang Pendidikan	:	SD

Sumber: Referensi Kemendigbud

3. Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu

Nama	:	SD NEGERI 012 SILIKUAN HULU
NPSN	:	10404798
Alamat	:	Silikuan Hulu
Kode Pos	:	29353
Desa/Kelurahan	:	Silikuan Hulu

	Kecamatan/Kota (LN)	:	Kec. Ukui
	Kab.-Kota/Negara (LN)	:	Kab. Pelalawan
	Propinsi/Luar Negeri (LN)	:	Prov. Riau
	Status Sekolah	:	NEGERI
	Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi/6 hari
	Jenjang Pendidikan	:	SD

Sumber: Referensi Kemendikbud

C. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari hakikatnya dalam sebuah penelitian penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansinya. Dalam penelitian ini tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, sebagai informan ialah bapak Edi Mohammad Muthar selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 017 Desa Bagan Limau, dan dalam hal penelitian ini pula, sebagai key informan adalah Bapak Suardi sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, serta sebagai informan

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana respon dari key informan dan informan terhadap strategi Dinas Pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama di Sekolah Dasar Negeri 017 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Serta sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu sebagai pembanding.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam amanat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberi jaminan pendidikan yang layak kepada setiap rakyatnya, yang dalam hal ini, tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, sebagai amanat dari Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang dalam hal ini dikhususkan kepada urusan wajib, yaitu pendidikan yang dipegang oleh Dinas Pendidikan telah memberikan banyak kontribusi dalam menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pelalawan, hal ini dinilai dari bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama di wilayah Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, yang menjadi fokus peneliti, dengan melihat perkembangan serta sarana dan prasarana sekolah yang pada tahun 2000-an masih sangat sederhana dan apa adanya, menjadi bagaimana sekolah tersebut terlihat sekarang.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi milik Markides (2004) bahwa strategi tersusun dari 3 unsur utama yang perlu diperhatikan, target, produk, dan kegiatan. Dimana indikatornya adalah:

1. Target

Adalah adalah sasaran yang dituju, yang dalam hal ini ialah

penerima hasil dari strategi, yang dilakukan penilaian terlebih dahulu hingga menjadi dasar dalam pembentukan strategi, yang nantinya akan dilakukan penyesuaian dalam pembuatan strategi tersebut, sehingga akan terjadi kesesuaian antar penerima dan yang direncanakan.

2. Produk

Adalah kebijakan yang tercipta dari strategi yang sudah disesuaikan dengan kondisi dari target kebijakan.

3. Kegiatan

Adalah proses pelaksanaan kebijakan yang merupakan hasil dari perencanaan strategi, yang didalamnya terkandung pelaksana serta pengawasan terhadap kegiatan dari kebijakan tersebut.

Dalam Rencana dan Startegi Pembangunan Daerah (RENSTRA PD) Dinas Pendidikan, melihat masih adanya sekolah-sekolah kelas jauh terutama di daerah Kecamatan Teluk Meranti sebagai akibat dari kondisi wilayah yang terpencil serta penduduk tempatan yang membentuk komunitas baru dan juga di Kecamatan Pangkalan Kuras akibat dari perpindahan penduduk dari luar, serta di daerah Bagan Limau yang masuk kategori wilayah dengan jarak antara desa dengan Dinas Pendidikan sangat jauh, serta masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan ke SLTA bagi daerah Dari analisi SWOT yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam RENSTRA PD, maka dihasilkan strategi yang digunakan

1. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Mempertahankan dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dan mengurangi Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SD/MI, SMP/MTs.
3. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan penguatan kompetensi profesi dan layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar minimal pendidikan.
4. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kelulusan siswa melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan penggunaan teknologi.
5. Menumbuhkembangkan bakat, minat dan kreativitas serta meningkatkan prestasi siswa.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7. Meningkatkan sarana prasarana dan alat/media pendidikan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
8. Meningkatkan mutu pelayanan bidang pendidikan nonformal, informal dan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK).
9. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha/industri.
10. Memberdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
11. Melanjutkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
12. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa daerah terpencil dan sangat terpencil/tertinggal, kurang mampu, dan berprestasi.

13. Meningkatkan mutu dan pemberdayaan pengawasan pendidikan.
14. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya Melayu serta mengembangkan kurikulum muatan lokal.
15. Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
16. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah berbasis keunggulan dan teknologi serta pengembangan sekolah standar nasional.
17. Merintis wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
18. Meningkatkan monitoring dan evaluasi

Adapun program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten

Pelalawan dalam peningkatan mutu pendidikan berupa:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
7. Program Program Penyelenggaraan Pendidikan
8. Program Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9. Program Peningkatan Guru Dan Tenaga Kependidikan
10. Program Peningkatan Mutu Siswa
11. Program Pendidikan Untuk Semua
12. Program Managemen Sekolah

13. Program Pendataan Pendidikan

14. Program Publikasi Dan Sosialisasi Pembangunan Pendidikan

Demi terwujudnya program yang direncanakan, dibutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit, berdasarkan pada data yang didapat penulis terhadap anggaran dana pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam kurun waktu 2019/2020/2021.

ANGGARAN DANA PENDIDIKAN (DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN)	
TAHUN	JUMLAH ANGGARAN
2019	Rp. 119.451.909.259
2020	Rp. 196.749.217.925
2021	Rp. 310.217.149.021

Sumber: Modifikasi Penulis

Berdasarkan pada teori yang digunakan peneliti dan melakukan penelitian, bahwa ada tiga usur utama dalam pembentukan strategi, yaitu Target, Produk (Kebijakan), serta Kegiatan.

1.1 Target

Target merupakan unsur pertama dalam pembentukan strategi, yaitu pemilihan dalam menentukan siapa yang akan menerima kebijakan yang akan dikeluarkan, yang dengan adanya target, maka akan mudah dalam penyesuaian pembuatan kebijakan, dikarenakan sudah mengetahui hal-hal yang paling cocok dan yang paling diperlukan oleh target. Dengan begitu akan membuat kebijakan yang nantinya terbentuk bisa lebih efektif dan efisien.

“Untuk pemilihan target mana yang didahulukan, kita punya stnadar skala prioritas kita sendiri, dalam musrembang juga sudah dibahas, dengan skala prioritas tadi, maka diharapkan semua sekolah mendapatkan giliran secara adil, kita juga berharap agar tidak terjadi kecemburuan, dan

merasa dianak tirikan, karena tujuan kita tetap meningkatkan mutu pendidikan” (Suardi, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 17-03-2021. Jam 02:00)

Menganalisi pernyataan yang diutarakan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, bahwa wadah utama untuk menerima masukan serta mendapatkan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas, demi memilih sekolah yang mendapat bantuan, dan yang lebih diutamakan, berdasarkan kebutuhan, hal ini tentu saja dapat memberikan rasa adil bagi pihak-pihak sekolah, namun membuktikan bahwa, bantuan yang diberikan juga terbatas, sehingga memerlukan skala prioritas dalam menentukan penerima bantuan.

Tidak hanya sampai disitu penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Zamri S.Sos selaku kasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Kabupaten Pelalawan.

“ Sarana dan Prasana pendidikan menjadi salah satu unsur yang krusial, dan menjadi perhatian utama, karena sangat besar pengaruh yang diberikan terhadap mutu pendidikan dapat meningkat atau tidak, untuk pemilihan sasaran bantuan, kita ambil contoh hasil pengamatan dari pengawas sekolah, berdasarkan laporan tersebut, kita bisa memilih sekolah mana yang lebih dahulu kita berikan bantuan.” (Muhammad Zamri Selaku Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar. 17-03-2021, jam 14:30)

Selain dari musrembang, hasil pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan juga menjadi unsur lain dari penentuan skala prioritas, dengan begitu, peran pengawasan sangat penting dalam hal ini, karena hasil laporan dari pihak pengawas akan berperan penting dalam penentuan skala prioritas.

Berdasarkan pada observasi penulis, bahwa skala prioritas memang digunakan oleh dinas pendidikan dalam menentukan prioritas yang menerima bantuan dari program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, seperti bantuan sarana dan prasarana, bangunan, serta buku paket, namun dari observasi penulis bahwa ada sekolah yang masih tergolong kurang dalam hal mutu, hal ini terjadi dikarenakan sudut lemah dari penggunaan skala prioritas itu sendiri, dikarenakan tidak selamanya dinas bisa bekerja efektif serta efisien dalam melakukan penilaian terhadap target kebijakan, hal ini disebabkan kebanyakan oleh lokasi dari target, dalam hal ini sekolah yang harus dinilai terlebih dahulu, apakah sudah layak masuk dalam daftar target kebijakan, atau belum. Dengan adanya permasalahan ini, diharapkan agar sekolah-sekolah yang ada bergerak lebih aktif berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan.

Melihat masalah ini, yang mana sehingga membuat penulis melakukan wawancara kepada kepala Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau.

“jatah yang didapat oleh sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sebenarnya tidak sesederhana itu, memang benar jika ada dari pihak Dinas Pendidikan yang memantau sekolah, dan menerima masukan dari sekolah, namun tidak menjadi jaminan bahwa kita akan dapat. Namun harus digaris bawahi, bukan berarti kita tidak pernah dapat, alhamdulillah kita dapat, bantuan bangunan, kelas dan perpustakaan, serta buku. Semua tergantung dari sekolah itu sendiri, jika mau jemput bola ke Dinas Pendidikan, dengan mengajukan proposal permohonan, besar kemungkinan akan dapat.” (Edi Muhta, Selaku Kepala Sekolah Negeri 017 Bagan Limau 15-03-2021. Jam 20:00)

Dengan melihat pengakuan diatas, penulis mengasumsikan, adanya kendala yang mungkin terjadi, sehingga membuat proses mendapat bantuan dari program peningkatan mutu pendidikan menjadi sedikit lebih sulit dari pada yang

dibayngkan, yang didukung oleh observasi penulis berupa sekolah-sekolah yang masih kurang dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Penulis juga melakukan wawancara kepada ibuk Ngantiyem selaku, Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu Silikuan Hulu. Mengenai target Dinas Pendidikan dalam penentuan skala prioritas pemberian bantuan.

“ Mengenai Pemberian bantuan oleh pihak Dinas Pendidikan, dalam kasus sekolah silikuan hulu ini tergolong lancar, untuk tahun ini kita juga mendapat bantuan lagi, hanya saja belum diserahkan dana bantuannya, dikarenakan kondisi Covid19” (Ngantiyem, Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu.15-03-2021, jam 10:00)

Bedasarkan pada hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan melalui analisis penulis, bahwa sekolah tersebut mendapatkan bantuan, yang lebih lancar dari pada sekolah utama dalam penelitian ini, sehingga menimbulkan pertanyaan, dimana letak perbedaan antar sekolah 012 sebagai sekolah pembanding, dengan sekolah 017 sebagai sekolah utama dalam penelitian ini.

Berdasarkan pada data wawancara yang telah dikumpulkan penulis, sehingga penulis mendiskusikan dengan pihak Dinas Pendidikan, mengenai masalah yang dialami oleh sekolah 017 dalam penerimaan bantuan.

“ tidak bisa dibilang sulit juga sebenarnya, karena ini menyesuaikan dengan keadaan saat ini, yang mana sebenarnya dana kita kurang, lebih tepatnya saya katakan cukup, sulit untuk menjadi maksimal dengan dana yang ada, tapi ya dana tersebut bisa dikategorikan cukup, sehingga kita seleksi dengan benar dan teliti mana yang pantas di prioritaskan, terlebih lagi jika kita membahas sekolah di desa Bagan Limau, akses jalan yang cukup sulit, membuat kita kesulitan melakukan pengecekan, saat hujan turun saja, jalan menjadi licin dan sulit dilalui “(Suardi, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 17-03-2021. Jam 02:00)

Dari data yang didapat oleh penulis, anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, meningkat dari dua tahun terakhir, namu dari

pernyataan pihak Dinas Pendidikan, anggaran yang ada dirasa hanya sebatas cukup, dan sulit untuk mencapai kata maksimal dalam proses menuju pendidikan yang lebih bermutu serta merata di setiap daerah.

Dengan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa ada beberapa kendala yang membuat target dari kebijakan menjadi sulit mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut, dari hasil observasi penulis pun, masih ada sekolah yang masih dalam kondisi yang belum cukup untuk masuk kategori bermutu.

1.2 Produk

Produk dalam hal ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini terkait kebijakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam peningkatan mutu pendidikan yang dalam hal ini berupa program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, kebijakan ini merupakan buah dari strategi yang telah dirancang diawal, yang diharapkan, kebijakan akan berjalan baik tanpa kendala karena sudah dilakukan riset sebelumnya, seperti penentuan target kebijakan.

“Dalam Kebijakan yang terbentuk, ada beberapa program unggulan yang kita punya, yang sudah kita laksanakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti program bantuan pembangun fisik, mengedarkan buku, serta pendidikan gratis dan juga beasiswa, yang tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2013, di 2017, kita juga mengagarkan dana sekitar 24% dari APBD, kita juga ada program beasiswa untuk yang mau kuliah, guru sekolah juga termasuk, yangmana harapannya kita bisa mendapat tenaga pendidikan yang berkualitas. “ (Suardi, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 17-03-2021. Jam 02:00)

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Zamri S.Sos selaku kasi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Kabupaten Pelalawan.

Mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

“Untuk program yang terbentuk, didalam renstra jangka lima tahunan yang kita miliki sebenarnya telah tertera program program yang akan kita laksanakan, terutama dibidang saya sendiri, yaitu bidang sarana dan prasarana, baik itu bantuan gedung, alat peraga pendidikan, hingga teknologi pendukung.” (Muhammad Zamri Selaku Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar. 17-03-2021, jam 14:30)

Dari hasil observasi penulis terhadap program yang disebutkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, bahwa program tersebut sudah berjalan, seperti pada fokus lokasi penelitian penulis yang salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau, bahwa sekolah tersebut benar adanya mendapatkan manfaat dari program bantuan bangunan, berupa ruang kelas, dan juga perpustakaan, namun dari sudut pandang penulis, yang mana masih cukup jauh dari kata bermutu.

Alasan penulis menganggap sekolah yang telah merasakan hasil dari program pemerintah dan mendapat bantuan, masih dianggap jauh dari kata bermutu, ialah dikarenakan hingga kini, walau sekolah telah berdiri sejak tahun 2000-an, setelah 20 tahun berlalu, sekolah saat ini masih belum bisa memenuhi kriteria mutu pendidikan yang tertera dalam undang-undang nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar pendidikan Nasional. Hal ini menjadi permasalahan yang akan terus ada, jika tidak di tangani dengan baik.

“Awal berdiri sekolah ini, masih bangunan swadaya dan seadanya, masih dari papan, dan saat izin operasional didapat, mulai berdiri bangunan permanen, tahun 1999, kemudian di tahun 2003 ada penambahan bangunan lagi, setelah itu di tahun 2017-2018 penambahan 3 lokal, dan 2019 penambahan 1 lokal. Dan untuk sekarang masih sangat kurang, ruangan kelas, kursi, meja, kita setiap tahun selalu mengajukan

permohonan ke Dinas Pendidikan, namun ya kadang dapat, kadang juga tidak, seperti tahun ini kita dapat bantuan ruang kelas, namun masih di tangguhkan karena kondisi covid, tapi bisa jadi dapat, bisa jadi dialihkan” .” (Edi Muhta, Selaku Kepala Sekolah Negeri 017 Bagan Limau 15-03-2021. Jam 20:00)

Dari yang disampaikan, dapat dilihat bahwa kebijakan terkait peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan memang terlaksana, dan dapat dilihat secara jelas, hanya saja, dari hasil wawancara dan observasi penulis, terutama pada Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau, bahwa hingga kini, sekolah masih sukar dikatakan bermutu, observasi penulis juga menemukan bangunan sekolah yang sudah tua, masih terdapat bangunan berbahan kayu, fasilitas sekolah yang mulai rusak, seperti jendela, kekurangan buku paket, penunjang pendidikan seperti jaringan telekomunikasi yang masih sulit, alat-alat penunjang lain seperti peraga belajar, dan teknologi pendukung seperti komputer.

Hal-hal diatas akan sangat mengganggu proses belajar, meihat bagaimana saat ini penggunaan kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan sangat memerlukan penunjang pendidikan yang sangat baik, mulai dari mencari referensi literatur yang banyak, yang biasanya dilakukan dengan menggunakan internet, serta alat peraga belajar agar siswa lebih paham dengan yang disampaikan oleh tenaga pendidik, yang nantinya dapat menaikkan minat belajar siswa, yang berujung pada pemenuhan dua point kriteria mutu pendidikan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2005, yaitu standar proses dan standar penilaian.

Penulis jugs mewawancarai salah seorang tenaga pendidik di sekolah untuk dimintai keterangan mengenai program yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

“Untuk saat ini, sangat membantu sekali terhadap sekolah kita, karena kita juga tahu bagaimana kondisi sekolah ini dulunya, bantuan bangunan serta buku paket menjadi angin segar, dan bisa sedikit membantu dalam proses belajar dan mengajar, namu bisa kita lihat, bahwa itu semua masih kurang, tapi untuk saat ini, sudah dangat membantu.” (Nurhandayani, selaku Guru Honor di sekolah Negri 017 Desa Bagan Limau, 16-03-2021, Jam 10:30)

Dari hasil wawancara, serta hasil observasi penulis, dapat disimpulkan mengenai indikator kedua dari strategi ya berupa kebijakan ini, bahwa, pembuatan kebijakan yang berdasarkan pada pemilihan target, dan penyesuaian terhadap Resntra yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, bahwa kebijakan berupa probram bantuan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Pelalawan telah berjalan sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan, dan berdasarkan pada hasil observasi penulis, bantuan program telah dirasakan oleh tiap-tipa sekolah, hanya saja berdasarkan dari pengakuan informan yang dipilih oleh penulis, menunjukan ketidak puasana dari bantuan yangdiberikan oleh dinas pendidikan, karena di anggap masih jauh dari yang sangat dibutuhkan, dan demi memenuhi standar mutu pendidikan.

1.3 Kegiatan

Merupakan bagian akhir dari teori strategi yang digunakan, pada bagian ini, menjadi penentu dari keberlangsungan program yang direncanakan, apakah program dapat berjalan baik, serta dapat bertahan lebih lama dikarenakan pelaksanaan serta pengawasan yang baik, atau bahkan mendapat masalah baru,

serta tidak dapat bertaha lama yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada indikator pelaksanaan didalamnya terkandung proses pelaksanaan, serta kegiatan pengawasan oleh pihak terkait, yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

“ Untuk proses pelaksanaan itu sendiri, dari sudut pandang kami, sudah berjalan dengan baik, dari laporan yang ada pun, sekolah-sekolah sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik lagi, dan sudah sesuai dengan harapan yang direncanakan diawal, bahkan dalam penilaian kinerja, tahun ini 2020 sudah mencapai hasil yang memuaskan” (Suardi, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 17-03-2021. Jam 02:00)

Mengenai proses pelaksanaan kegiatan, dari observasi yang didapat penullis bahwa memang benar sudah berjalan, hanya saja penulis merasa kurang efektifnya pelaksanaan tersebut, seperti kita ambil contoh, program bantuan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, seperti yang telah kita singgung pada indikator awal, mengenai penggunaan skala prioritas, bahwa dalam hal pelaksanaan ini, tidak hanya Dinas Pendidikan yang harus berperan aktif, tapi pihak sekolah juga harus berperan penting demi mendapat bantuan yang di programkan. Dengan begitu harusnya masih bisa ditingkatkan lagi.

Pengurangan performa ini bukan tanpa alasan, bahwa kondisi jalan yang sulit, serta jarak yang cukup jauh yang harus ditempuh menjadi kendala yang cukup berarti dalam segi pelaksanaan, bahkan sangat mengganggu kegiatan pengawasan.

“ Untuk pengawasan sendiri, tentu ada dari pihak kita, karena itu bagian dari tugas kita, mengenai masalah itu, kita punya Pengawas sekolah, yang mengawasi sekolah sekolah binaanya, juga ada Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selai pelaksanaan, juga ada fungsi pengawasan, jadi untuk masalah itu, sudah ditangan dan berjalan baik hingga saat ini.” (Suardi, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan 17-03-2021. Jam 02:00)

Sesuai dengan yang disampaikan penulis diawal, kondisi jalan yang jauh serta sulitnya, menyebabkan kendala bagi proses pengawasan itu sendiri, yang menjadi kurang efektif. Berdasarkan pada observasi penulis terhadap kondisi jalan yang dilalui demi mencapai lokasi sekolah Negri 017 Desa Bagan Limau ialah berupa jarak tempuh yang jauh, jika dihitung dari pusat pemerintahan, yang dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, selain jarak tempuh yang jauh, jenis jalan yang dilalui juga berjenis tanah, dengan terdapat tanjakan yang cukup curam, yang dalam hal ini akan sangat dipengaruhi oleh cuaca, jika terjadi hujan, maka jalan akan menjadi licin, dan sulit dilalui, tidak jarang jika kondisi sedang linci, banyak terjadi kecelakaan tunggal, maupun disebabkan oleh kendaraan lain yang tergelincir, baik saat melewati tikungan, atau saat sedang menanjak.

Kondisi jalan yang telah disebut penulis diatas menjadi hambatan yang cukup besar, dikarenakan pihak sekolah yang ingin ke Dinas Pendidikan, baik dalam rangka permohonan bantuan sekolah, ataupun pihak dinas Pendidikan yang ingin mengunjungi sekolah dalam rangka peninjauan, lebih memilih untuk membatalkan keberangkatan, yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak bersahabat.

Hasil observasi ini juga didukung oleh pernyataan dari pihak Sekolah Dasar Negeri 017 Desa Bagan Limau, mengenai kondisi jalan yang ada saat ini

“ Setiap tahun ada yang datang, baik itu dari pihak Dinas Pendidikan langsung seperti Kepala Seksi Pengadaan Sarana Pendidikan, yang datang berkunjung, selalu ada tiap tahun, walau kita sadari kondisi akomodasi jalan yang cukup sulit, kalau hujan datang, akan sulit untuk menuju kesekolah, ya ada kendala tersendiri lah.” (Edi Muhta, Selaku Kepala Sekolah Negeri 017 Bagan Limau 15-03-2021. Jam 20:00).

Berdasarkan pada pengakuan dari pihak Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau, serta pada observasi penulis, terdapat korelasi pada kendala yang ditemukan oleh penulis, namu kondisi berbeda ditemukan pada sekolah pembading yaitu Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu, yang mana berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan oleh peneulis:

“ kegiatan yang dilakukan oleh dinas dalam rangka sosialisasi hingga pemantauan kondisi sekolah, cukup sering, yang paling sering dilakukan oleh pengawas sekolah, bahkan jika kita mengajukan permohonan untuk permintaan bantuan, pada tahun depannya akan direalisasikan” (Ngantiyem, Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri 012 Silikuan Hulu.15-03-2021, jam 10:00)

Hasil observasi penulis terkait kondisi sekolah, bahwa kondisi sekolah yang dijadikan sebagai pembading ini, tidak terlalu berbeda jauh dari sekolah utama, hanya saja akses jalan yang dimiliki sedikit lebih baik dari pada sekolah utama dalam penelitian ini, walau kondisi jalan masih berjenis tanah, hanya saja lebih mudah dilalu, bahkan dalam kondisi hujan, walau sedikit licin.

Dari data yang didapat oleh penulis baik dalam bentuk wawancara maupun observasi, bahwa kondis akses jalan yang harus ditempu pada tiap sekolah menajdi pengaru dalam pada saat penentuan skala prioritas, melihat pernyataan

dari pihak Dinas bahwa proses pengawasan sekolah menjadi sumber lain bagi dinas dalam melakukan penentuan skala prioritas.

Hanya saja, pada observasi yang telah dilakukan oleh penulis, didapati bahwa kondisi sekolah pembanding lebih butuh perhatian lebih, pada bagain bangunan sekolah, yang menyebabkan proses penentuan skala prioritas terhadap sekolah pembanding menjadi lebih tinggi, selain pada kondisi akses yang menjadi kemudahan bagi pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam melakukan kegiatan pengawasan.

B. Hambatan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau

Dalam hal ini, baik dari hasil observasi penulis, maupun dari hasil wawancara serta data dokumentasi yang didapat oleh penulis sendiri mengenai kendala yang ada, secara garis besar, ada dua hambatan yang ditemukan penulis yang menjadi halangan yang cukup besar dalam proses perbaikan serta peningkatana mutu pendidikan terutama di Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau.

a. Dana

Kendala pertama datang dari masalah yang cukup sering dialami, yang tidak hanya dirasakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan saja, namu kuga dirasakan oleh instansi lain, bahkan pada tahun 2021 ini, Kabupaten Pelalawan mengesahkan APBD sebesar 1.4 Triliun Rupiah, dengan anggaran pendidikan sekitar Rp. 310.217.149.021, yang dari pengakuan Bapak Suardi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian bahwa dana yang ada saat ini masih

kurang, dan dirasa masih belum cukup untuk mencapai kemaksimalan dalam proses meningkatkan mutu pendidikan, terutama di sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau Kecamatan Ukui. Namun harus digaris bawahi, dana tersebut bukan berarti sangat sedikit, hanya saja masuk dalam kategori cukup.

Seperti halnya pernyataan pihak Dinas pendidikan Kabupaten Pelalawan yang diwakilkan oleh Bapak Suardi sebagai Kasubag Umum 17-03-2021. Jam 02:00

“Seperti yang saya katakan diawal, kendala utama itu selalu masalah pendanaan yang kurang, hal itulah yang menjadi alasan kenapa kita menggunakan sistem skala prioritas, jika dana kita berlimpah, maka, setiap sekolah akan langsung mendapatkan bantuan dengan jumlah yang cukup dalam waktu yang bersamaan”

Dari sudut pandang penulis, permasalahan keuangan sangat mudah dilihat dan diketahui, dengan adanya skala prioritas, menandakan dana yang ada masih dari kategori cukup, dimana sekolah sekolah harus berebut dalam menerima bantuan, sesuai dengan pengakuan dari informan penulis, bahwa jika dari pihak sekolah sendiri tidak mengambil tindakan secara cepat dan sigap, maka bisa jadi tidak mendapatkan bantuan dan harus menunggu hingga tahun depan.

b. lokasi

Lokasi menjadi kendala lain yang muncul dalam proses peningkatan mutu pendidikan itu sendiri, dimana lokasi yang diteliti penulis yang berada di Desan Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, memiliki akses jalan yang cukup sulit, jalan yang masih tanah dan tidak rata, serta akses jalan yang berada di

perkebunan menjadi kendala tersendiri, apalagi kondisi cuaca hujan yang menjadikan jalan lebih sulit untuk dilalui bahkan untuk kendaraan roda dua.

“Kendala lainnya kita bisa lihat sendiri kondisi jalan menuju sekolah, yang jenis jalannya masih tanah, belum lagi jika terjadi hujan, dengan sulitnya akses dan terhitung cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, yang kadang menjadi kesulitan tersendiri bagi pengawas sekolah, ataupun kunjungan dari Dinas secara langsung” (Edi Muhta, Selaku Kepala Sekolah Negeri 017 Bangan Limau 15-03-2021. Jam 20:00).

Dengan begitu akan menghambat proses pelaksanaan serta pengawasan menjadi kurang efektif, yang nantinya berdampak pada keberlangsungan kegiatan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang nantinya strategi akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sebuah kebijakan, yang mana strategi terdiri dari tiga unsur yang membentuknya menurut Markides (2004), yaitu Target dari Strategi, Produk (Kebijakan), Serta Pelaksanaannya, yang dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama pada Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan pada strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan dan Strategi Daerah (RENSTRA PD) yang dalam hal ini tertuang target strategi yang dirasa perlu dilakukan tindakan demi tercapainya pendidikan yang bermutu, adapun target tersebut terdapat dalam point *Threats* dalam analisis SWOT seperti sekolah yang jumlah siswanya kecil, pemerataan guru yang kurang, sekolah kelas jauh yang masih kurang dalam kategori bermutu, sebagian kecil sekolah yang mengalami rusak berat dan sedang, sarana dan prasarana yang belum merata, rendahnya angka melanjutkan pendidikan, penduduk usia produktif yang buta huruf, dan rendahnya partisipasi siswa PAUD di daerah terpencil dan sangat terpencil. Berdasarkan pada target strategi diatas, menciptakan kebijakan yang memuat beberapa program dalam peningkatan mutu pendidikan seperti program peningkatan sarana dan prasarana, program penyelenggaraan pendidikan, program pendidikan PAUD, program peningkatan Guru dana tena kependidikan, program

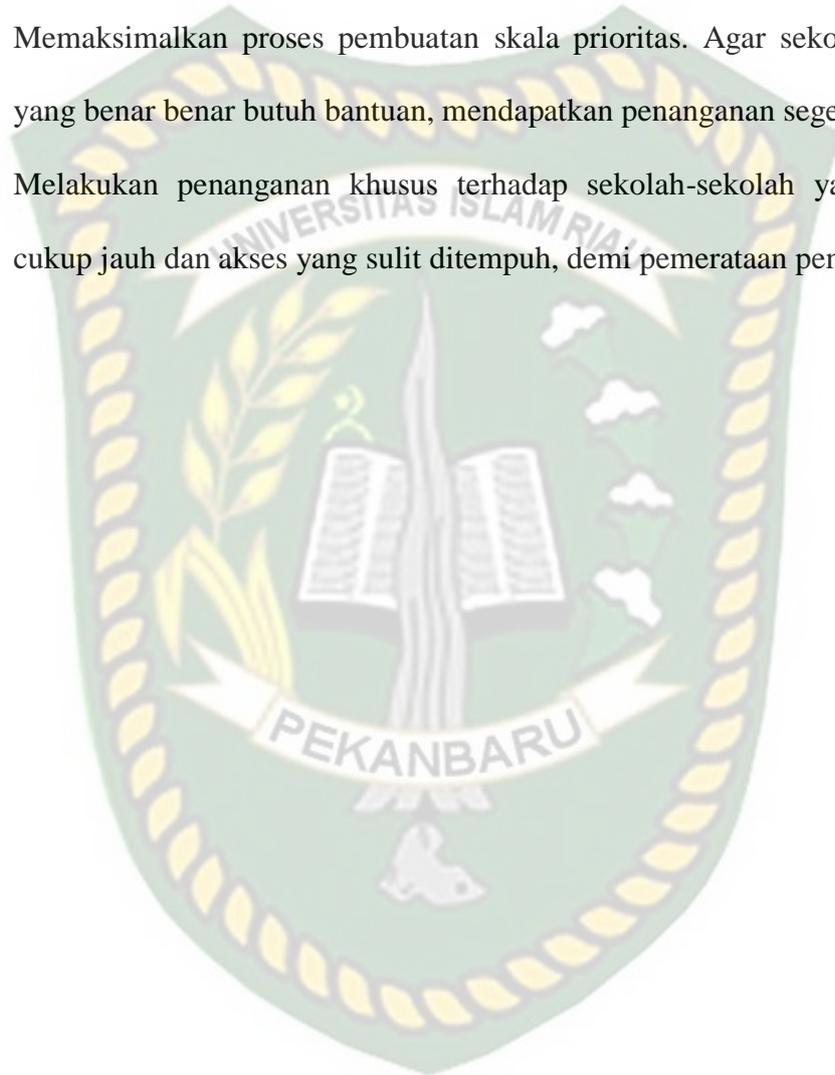
peningkatan mutu siswa, serta program pendidikan untuk semua. Dengan terciptanya program yang berdasarkan pada strategi yang telah dibuat, penulis menemukan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi, penulis menyatakan bahwa strategi yang digunakan sudah berjalan dan terlihat hasilnya, yang mana strategi tersebut dibuat pada tahun 2016 yang mencakup kegiatan hingga 2021. Namun pada akhir masa penggunaan RENSTRA tersebut, penulis masih melihat ada sekolah yang masih belum bisa dikatakan bermutu, terlihat dari sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang, serta akses jalan yang masih cukup sulit.

Pengumpulan data, juga memberikan fakta bahwa anggaran yang ada masih belum memenuhi semua kebutuhan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan ini, perlu digaris bawahi bahwa dana yang ada hanya dirasa cukup, menurut pengakuan dari key informan dalam penelitian bahwa, dana tersebut masih belum cukup untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal, tapi cukup untuk menanggulangi prioritas yang sudah ditentukan. Kurangnya dana ini menjadi hambatan bagi sekolah di kabupaten Pelalawan, yang mana, tiap tiap sekolah harus berusaha dengan keras dan secara terus menerus membuat laporan serta proposal permohonan agar masuk dalam skala prioritas, dan mendapatkan program bantuan dari Dinas Pendidikan. Pada kasus Sekolah Dasar Negeri 017 Bagan Limau, akses ke lokasi menjadi tantangan tambahan, dimana jalan masuk masih merupakan jalan poros, dan masih dalam kondisi tanah serta berada di perkebunan sawit, dan akan lebih menyulitkan lagi jika kondisi hujan, maka jalan akan menjadi licin.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis mengenai strategi dinas pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan:

1. Memaksimalkan proses pembuatan skala prioritas. Agar sekolah-sekolah yang benar benar butuh bantuan, mendapatkan penanganan segera
2. Melakukan penanganan khusus terhadap sekolah-sekolah yang berada cukup jauh dan akses yang sulit ditempuh, demi pemerataan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Allison M. dan Kaye, J. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Anthony, W.P., Parrewe, P. L., dan Kacmar, K.M. 1999. *Strategic Human Resource Management*. Second Edition. Orlando: Harcourt Brace and Company.
- Awang, Azam & Mendra, Wijaya, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru, Alaf Riau
- Cameron and Quinn. (1999). "Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework, Reading, Mass: Addison Wesley"
- David, Fred R, 2011. *Strategic Management*, Buku 1. Edisi 12 Jakarta.
- Fandy Tjiptono. 2006. *Manajemen Jasa*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- Glueck, William F dan Jauch, Lawrence R. " *Manajemen Strategis dan Kebijakan* ", Erlangga, Jakarta, 1994.
- Hasan, Erlina 2005. *Komunikasi pemerintahan* .Bandung: Rafika aditama.
- Hamel dan Prahalad. *Management*. New Delhi: Tata McGraw Hill, 1995.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,Grasindo, Jakarta.
- _____, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- Husaini Usman. 2006. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Jatmiko, Rammad Dwi. 2003. *Manajemen Stratejik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian teori, Konsep dan pengembangan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN
- Maulidiah, Sri, 2014. *Pelayanan Publik (Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan)*. Bandung: Indra Prahasta
- Markides, Costas, 2004, *What Is Strategy And How do You Know if You Have One*. SSRN
- Moekijat, 2005. *Pengembangan Organisasi*. Cetakan Ketujuh, Bandung; Mandar Maju
- Munaf, Yusri, 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Teori Budaya Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta:Rineka Cipta
- Pearce II, John A. dan Robinson Richard B.Jr. 2008. *Manajemen Strategis 10. Salemba Empat* : Jakarta.
- Porter, Michael E. 1998. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: The Free Press.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- _____ - (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama
- Rosidi, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media, Padang.

Sudrajat, Hari. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Mutu sekolah (MPMBS)* Bandung: Cipta Grfika.

Stoner, James A.F; Freeman, R. Edward; Gilbert JR, Daniel. R, 2005, *Manajemen, Jilid I*, PT Bhuana Ilmu Populer.

Syafiie, Kencana.2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, Kencana Inu, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama

Wasistiono, Sadu. 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*. Fokusmedia, Bandung

Dokumentasi

UUD Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-undang no 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 21 Tahun 2002

Peraturan Daerah Pelalawan Nomor 7 Tahun 2008



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email. fispol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 281 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

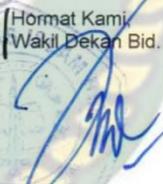
Nama : Dana Maulana Akhsan
NPM : 167310571
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Oleh Dinas Pendidikan Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan
Persentase Plagiasi : 25 %
Jumlah Halaman : 82 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230